

RINGKASAN

Permasalahan dalam implementasi kebijakan pertanahan hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga masih banyak konflik pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menentukan pencapaian implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kebumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kebumen yang didasarkan pada pencapaian program PTSI tertinggi dan terendah di tingkat desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis model interaktif dan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menggambarkan aspek komunikasi mulai dari tahap awal implementasi sudah berjalan secara efektif mekanisme publikasi, sistem koordinasi dan keterbukaan informasi sudah terpenuhi dengan baik, tetapi sebagian masyarakat pemilik bidang tanah yang perolehannya berstatus tanah warisan tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi karena berada di luar kota. Aspek sumber daya menjadi faktor penghambat pencapaian program PTSI, pertama kurangnya jumlah SDM pelaksana pada ATR/BPN sebagai tim penggerak yang harus menjangkau seluruh kecamatan, kedua Pembiayaan yang bersifat swadaya dan dibebankan oleh masing-masing pemilik bidang tanah menjadi faktor penghambat ketercapaian program PTSI karena biaya yang disepakati bersama melalui forum musyawarah masyarakat dirasa masih terlalu tinggi bagi sebagian masyarakat, sedangkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen belum mencukupi. Aspek disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi program PTSI hal ini dapat dilihat pada wilayah yang pencapaian program PTSI tinggi karena dapat memobilisasi kegiatan secara swadaya, sedangkan di wilayah yang pencapaiannya rendah disebabkan kurangnya komitmen dan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan alokasi anggaran biaya PTSI, Pembentukan panitia adjudikasi yang belum memenuhi struktur serta masih rendahnya dukungan pemerintah desa untuk memobilisasi partisipasi masyarakat sehingga menurunkan motivasi petugas teknis BPN untuk melaksanakan program PTSI. *Keempat* pada aspek struktur birokrasi pembentukan kepanitiaan pelaksana PTSI di tingkat desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Kebijakan Pertanahan, Komunikasi, Sumberdaya, Struktur Birokrasi

SUMMARY

The Problems in the implementation of land policies are still experiencing many obstacles, so that there are still many land conflicts that occur in the community. This study aims to determine and analyze aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in determining the achievement of the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kebumen Regency.

The method used in this research is qualitative method. The research was conducted in Kebumen Regency based on the highest and lowest PTSL program achievements at the village level. Data was collected through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by using interactive model analysis method and testing the validity of the data by using triangulation technique.

The results of the study illustrate that the communication aspect starting from the early stages of implementation has been running effectively, the publication mechanism, the coordination system and information disclosure have been fulfilled properly, but some people who own land parcels whose acquisition is inherited land status cannot fulfill administrative requirements because they are outside the city. The aspect of resources is a factor that hinders the achievement of the PTSL program, firstly, the lack of implementing human resources at ATR/BPN as a driving team that must reach all sub-districts, secondly, self-supporting financing that is borne by each owner of land parcels is a factor inhibiting the achievement of the PTSL program because of costs. which was mutually agreed upon through the community deliberation forum was deemed too high for some people, while the subsidy provided by the Kebumen Regency government was not sufficient. Aspects of disposition and bureaucratic structure are factors that support the successful implementation of the PTSL program, this can be seen in areas with high PTSL program achievement because they can mobilize activities independently, while in areas with low achievement due to the lack of commitment and involvement of the district government in realizing the PTSL budget allocation, The formation of an adjudication committee that has not met the structure and the low support from the village government to mobilize community participation has reduced the motivation of BPN technical officers to implement the PTSL program. Fourth, in the aspect of the bureaucratic structure, the establishment of the PTSL implementing committee at the village level did not run as it should.

Keywords: Bureaucratic Structure, Communication, Disposition, Implementation, Land Policy, Resources